**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Skripsi ini bermaksud untuk membahas tentang investasi asing dalam bidang keuangan di Indonesia yang diselenggarakan oleh perbankan investasi. Topik tersebut dipilih karena sangat menarik perhatian sehubungan dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam bidang keuangan dan perbankan.

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam nomor satu di dunia, yang sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi negara maju. Namun sayangnya, banyak hambatan-hambatan yang menghalangi kemajuan tersebut, seperti kondisi keuangan yang hingga saat ini menjadi masalah yang sangat serius, kurangnya modal kerja yang terseda, kurangnya kemampuan atau *skill* dan kurangnya teknologi serta fasilitas yang tersedia.

Munculnya kendala-kendala tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam, khususnya untuk kendala modal kerja dan langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangannya. Pemerintah telah menetapkan suatu undang-undang untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia. Undang-undang tersebut yaitu UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam Pasal 2, terpapar pengertian modal asing yaitu: (a) alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan Perusahaan di Indonesia; (b) alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia; dan (c) bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, UU yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyediakan berbagai fasilitas dan perangsang di bidang perpajakan
2. Jaminan untuk mentransfer keuntungan
3. Jaminan hukum terhadap kemungkinan nasionalisasi
4. Prosedur penyelesaian perkara atau sengketa yang akan timbul akibat penanaman modal asing tersebut.

UU tentang Penanaman Modal Asing ini memberi peluang bagi modal asing berusaha di segala bidang, kecuali pada bidang yang menyangkut kepentingan dan pertahanan negara di bidang yang menguasai hajat hidup rakyat banyak.

Melalui berbagai macam penyediaan fasilitas dan rangsangan serta upaya dan berbagai macam cara yang ditempuh, untuk membenahi berbagai masalah yang dianggap penting merupakan bukti nyata akan minat pemerintah Indonesia untuk mengundang para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, guna mengatasi berbagai kendala pembangunan Indonesia.

Pemerintah juga mengambil inisiatif untuk mengambil langkah-langkah penting yang menunjang kebijaksanaan penanaman modal asing di Indonesia, yaitu antara lain melalui penetapan UU No.14 tahun 1967 tentang Perbankan, yang isinya antara lain membuka peluang bagi modal asing untuk menjalankan usaha Bank Asing di Indonesia. Menurut UU tentang Perbankan tersebut, maka bank asing yang didirikan di Indonesia hanya dapat berusaha dalam bidang bank pembangunan dan atau bank umum dengan mengutamakan kegiatan-kegiatannya yang bermanfaat bagi pembangunan negara dan kepentingan nasional pada umumnya. Bank asing tersebut hanya dapat didirikan dalam bentuk cabang dari bank yang sudah berdiri di luar negeri atau suatu bank campuran antara bank asing dan bank nasional di Indonesia dan berbentuk perseroan terbatas.

Perbankan sendiri merupakan perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Hal tersebut tercermin pada UU RI No. 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 yang menjelaskan mengenai Perbankan. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan BANK *adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*. Seperti pada pengertiannya, yang pada intinya perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat[[1]](#footnote-1).

Dalam prakteknya, perbankan dibagi menjadi dua jenis menurut fungsi pendanaannya, yakni bank komersil dan bank investasi[[2]](#footnote-2). Kunci perbedaan antara bank komersil dan bank investasi yaitu:

* Bank Komersil
* Bertindak sebagai *principal* jangka panjang
* Memberikan pinjaman langsung kepada debitur
* Bank Investasi
* Bertindak sebagai *principal* jangka pendek

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan menyorot tentang kegiatan investasi perbankan. Dalam kamus bisnis dan bank[[3]](#footnote-3), bank investasi (*investment* banking) adalah bank yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana jangka panjang yang diperlukan oleh perusahaan dengan cara membeli, menjual, dan menjamin surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan. Namun, di Indonesia belum ada jenis bank ini sehingga dalam perkembangannya di pasar modal, bank investasi masih dikuasai oleh pihak asing, baik perbankan asing yang membuka cabang di Indonesia maupun pihak asing yang bekerja sama dengan perbankan Indonesia.

Setelah berjalan lebih dari dua puluh tahun, pemerintah mengadakan evaluasi dari hasil kebijaksanaan yaitu untuk mengundang modal asing masuk dalam bidang perbankan Indonesia. Melalui paket deregulasi, dalam bidang moneter, keuangan dan perbankan yang tertuang dalam PAKTO-27 yang bertujuan untuk mengerahkan dana masyarakat untuk peningkatan akan ekspor non migas, efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan moneter dan iklim pengembangan pasar modal, maka pemerintah memberi kemungkinan yang selama ini tertutup, untuk membuka bank campuran di Indonesia, yaitu bentuk *joint venture* dalam usaha perbankan antara satu atau lebih bank nasional Indonesia dengan satu atau lebih bank asing di luar negeri dengan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dan melalui PAKTO 27 Oktober 1988. Melalui persyaratan tersebut, pemerintah memberi peluang bagi pembukaan kantor cabang pembantu bank asing di tujuh kota besar di Indonesia yaitu: Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang dan Denpasar. Ditetapkan pula bahwa dalam rangka meningkatkan peranan bank asing di Indonesia, khususnya dalam rangka ekspor non migas, pemerintah telah meninjau kembali ketentuan tentang tempat dan bidang usaha serta prosedur perizinan bank asing, yaitu bahwa bank asing yang berkedudukan di Jakarta dapat memberikan jasa-jasa perbankan kepada nasabah-nasabahnya di seluruh Indonesia.

Paket deregulasi bidang moneter, lembaga keuangan dan perbankan itu pada dasarnya bertujuan untuk membuka lebar dan memberi kesempatan yang sama bagi semua kelompok bank agar bersaing dengan ketat demi terciptanya kondisi perbankan yang lebih dinamis di Indonesia. Dengan adanya ketentuan mengenai *capital adequency*, *legal lending limit* dan tingkat kesehatan yang berlaku bagi semua bank, maka perkembangan dan pertumbuhan bank akan dikendalikan dan dibatasi oleh kemampuan masing-masing bank. Oleh sebab itu, maka semua bank akan menghadapi suasana sangat kompetitif dan masing-masing bank akan berusaha memberi pelayanan yang maksimal, sehingga banyak dana yang harus dikeluarkan demi penyempurnaan organisasi dan perbaikan sistem dan manajemen kerja, sehingga semakin sulit untuk mencari keuntungan dan tambahan modal. Untuk menghadapi permasalahan yang sangat kompleks itu, maka upaya yang ditempuh adalah melalui pasar modal.

Dalam lembaga pasar modal, pemerintah telah membuat peraturan yang tercermin dalam UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan secara jelas dipaparkan dalam SK MenKeu No. 1055/KMK.013/1989 tentang Pembelian Saham Oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal, bahwa pihak asing atau modal asing dilarang membeli saham yang diemisikan oleh bank swasta nasional yang *go public*. Dengan adanya larangan bagi modal asing membeli saham bank swasta nasional yang *go public* maka terlihatlah sekali lagi bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang kurang konsisten dalam upayanya untuk mengundang modal asing masuk dalam bidang perbankan Indonesia.

Oleh karena latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, maka skripsi ini akan meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi investasi oleh perbankan asing di Indonesia. Ruang lingkup permasalahan:

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong perbankan asing melakukan investasi langsung di Indonesia ditinjau dari sudut regulasi, yaitu masalah mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam upayanya mengundang modal asing masuk dalam dunia perbankan di Indonesia dan pengaruhnya terhadap minat perbankan asing melakukan investasi langsung di Indonesia.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut dibawah ini, yaitu:

1. Studi Kepustakaan dengan mengamati sumber hukum primer dan sekunder serta berdasarkan hipotesa yang diambil dari hasil pengamatan para ahli.
2. Wawancara dengan beberapa sumber informasi yang akurat.

Sistematika penulisan:

Bab kesatu, akan menyampaikan latar belakang pemilihan judul skripsi dan akan mengemukakan tujuan penulisan skripsi serta akan memuat mengenai ruang lingkup penulisan serta metode penulisan yang akan digunakan dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Bab kedua, akan membahas mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, keadaan perbankan secara umum, pengertian investasi secara sekilas namun dipaparkan dengan cukup jelas, juga mengenai keadaan dan peraturan investasi di Indonesia khususnya mengenai investasi oleh perbankan asing.

Bab ketiga, akan menelaah mengenai investasi yang dilakukan perbankan asing di Indoensia serta bentuk-bentuk investasi yang dilakukannya.

Bab keempat, akan menganalisa mengenai regulasi tentang investasi perbankan asing dan dibandingkan dengan salah beberapa negara di Asia Tenggara serta faktor-faktor penarik perbankan asing melakukan investasi di Indonesia.

Bab kelima, sebagai penutup memuat kesimpulan dan saran mengenai keadaan yang sebenarnya dari masalah Investasi Asing dalam Bidang Perbankan di Indonesia.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana Peranan Regulasi Indonesia dalam menarik PMA?

2) Bagaimana Kondisi Perekonomian Indonesia sebelum dan sesudah masuk PMA?

3) Bagaimana Korelasi dinamika regulasi perbankan Indonesia terhadap PMA yang masuk ke Indonesia?

1. **Pembatasan Masalah**

Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya investasi asing dalam kenyataan masih sulit untuk diwujudkan. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain: (1) faktor sumber daya alam; (2) faktor sumber daya manusia; (3) faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha; (4) faktor kebijakan pemerintah; (5) faktor kemudahan dalam perizinan[[4]](#footnote-4).

Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter. Krisis moneter ini diawali dengan terdefresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Defresiasi nilai tukar rupiah makin tajam sehingga krisis moneter yang terjadi tersebut berlanjut menjadi krisis ekonomi yang dampaknya terasa hingga saat ini. Pertumbuhan ekonomi berjalan sangat lambat.

Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali erekonomian nasional seperti sediakala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia. Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya investasi asing dalam kenyataannya masih sulit untuk diwujudkan.

Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuk investasi ke Indonesia pada saat ini. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi ke suatu negara, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, tampaknya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Bahkan otonomi daerah yang sekarang diterapkan di Indonesia dianggap menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah.

Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasana teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal aing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.

Salah satu sektor yang memegang peran penting dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia adalah perbankan asing. Peran bank sendiri sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dalam hal mendukung pembangunan, karena pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung kepada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan[[5]](#footnote-5). Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) terutama bagi bank-bank milik pemerintah diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter[[6]](#footnote-6). Memelihara kestabilan moneter salah satunya bisa dilakukan dengan mengatur perputaran uang di masyarakat melalui peranan bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Fakta menunjukkan bahwa dewasa ini hampir semua sektor yang berkatan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank[[7]](#footnote-7) sehingga peran sebagai perantara keuangan yang dimiliki oleh bank dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana juga akan menunjang kelancaran aktivitas perekonomian[[8]](#footnote-8).

Saat ini, peran bank tidak hanya terbatas dalam bidang komersil semata (tabungan, simpan-pinjam, kredit, deposito), namun juga dalam bidang investasi. Tak pelak, peran bank sebagai perusahaan yang membeli, menjual, menjamin sekuritas (surat berharga milik perusahaan) dan juga memberikan saran yang berhubungan dengan keputusan finansial perusahaan (*financial advisor*) untuk melakukan berbagai kegiatan seperti likuidasi, konsolidasi, ataupun merger dan akuisisi dinilai semakin penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia.

Untuk memberikan pemaparan yang lebih fokus dalam penelitian ini, maka peneliti akan memfokuskan pada penelitian yang mengamati Perbankan Asing terkait faktor-faktor yang mendorongnya untuk melakukan investasi di Indonesia dimulai saat Indonesia mengalami krisis moneter 1998 hingga saat ini, yakni tahun 2014 dikarenakan penulis ingin melihat perkembangan investasi asing di Indonesia sehingga dapat menentukan faktor-faktor pendorong Perbankan Asing melakukan investasi, menganalisis regulasi terkait, dan membandingkan dengan regulasi-regulasi negara lainnya.

1. **Perumusan Masalah**

Kebutuhan Indonesia akan penanaman modal dari pihak asing terus meningkat, seiring semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Salah satu pihak yang diharapkan muncul sebagai investor adalah Perbankan Asing. Dengan demikian, maka peneliti akan mencoba menjawab pertanyaan riset, yaitu:

**Analisis Faktor-Faktor Penarik Perbankan Asing Melakukan Investasi Langsung Di Indonesia**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan penjelasan identifikasi masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana jalannya regulasi yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia.
2. Mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perbankan asing melakukan penanaman modal di Indonesia.
3. Mengetahui bagaimana perbandingan regulasi tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dengan negara lainnya di Asia Tenggara sehingga mempangaruhi ketertarikan Perbankan Asing melakukan penanaman modal di Indonesia.
4. **Kegunaan Penelitian**
5. Kegunaan teoritis

Memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam dunia Perbankan dan Penanaman Modal Asing.

1. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan bagi para penstudi Hubungan Internasional yang menaruh minat pada Penanaman Modal Asing dan regulasi yang mengaturnya di Indonesia.

1. **Kerangka Teoritis dam Hipotesis**
2. **Kerangka Teoritis**

Dunia saat ini tidak lepas dari apa yang disebut dengan globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses dimana terjadinya peningkatan perpindahan arus barang, jasa, ide, manusia, dan modal secara bebas yang berujung pada tebentuknya suatu integrasi ekonomi dan masyarakat.[[9]](#footnote-9) Proses integrasi ini didorong oleh adanya perkembangan teknologi, transportasi, serta komunikasi media massa dimana hal-hal ini membuat perpindahan hal-hal tadi menjadi lebih mudah. Globalisasi menyediakan solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, kesempatan bagi negara untuk memajukan perekonomian dapat tebuka lebar dengan pasar yang luas, investasi, barang dan jasa yang murah dan beragam serta diharapkan dapat mengurangi masalah kemiskinan.[[10]](#footnote-10)

Liberalisme melihat bahwa kondisi dunia saat ini adalah memang globalisasi.[[11]](#footnote-11) Negara-negara saat ini sangat dipengaruhi tidak hanya oleh kondisi domestik saja tapi juga oleh kondisi masyarakat dari luar dimana hal ini akan berimbas pada interaksi perkonomian dan budaya negara tersebut yang akan terpengaruh oleh globalisasi tadi. Dengan kondisi yang seperti ini, maka negara harus membuat kebijakan yang tepat dengan mempertimbangkan segala faktor, baik faktor domestik maupun faktor luar sehingga kebijakan ini dapat bertahan dan bersaing di tengah-tengah kondisi dunia yang didominasi oleh globalisasi.

Dalam hal pembuatan kebijakan ekonomi, negara telah menentukan pilihan-pilihan yang digunakan sebagai dasar untuk perumusan kebijakan. Kebijakan ini bisa saja menghalangi atau mendukung globalisasi dan tentu hal ini pasti akan berpengaruh pada lingkup domestik maupun internasional. Kebijakan yang dibuat oleh negara bisa saja merugikan atau menguntungkan individu atau kelompok yang berada di dalam negara tersebut.[[12]](#footnote-12) Hal inilah yang nantinya akan menciptakan tekanan serta tuntutan pada negara untuk membuat kebijakan yang memfasilitasi kebutuhan dan tujuan dari aktor domestik tadi. Tekanan yang bersifat sosial ini yang nantinya menjadi pertimbangan negara dalam menentukan pilihan dan merumuskan kebijakan luar negeri.

Tekanan sosial ini sangatlah penting bagi suatu negara karena tekanan sosial inilah yang sebenarnya menjadi dasar penentuan pilihan atau kebijakan luar negeri suatu negara. Tekanan sosial ini menunjukkan apa yang menjadi motivasi bagi negara untuk bergerak di dunia internasional dimana negara memproyeksikan tekanan sosial tadi menjadi sebuah kebijakan luar negeri dan memperjelas akan hal apa yang ingin dicapai atau dicari negara tersebut di luar negara. Tekanan sosial, khususnya dari grup yang dominan, yang bisa membuat negara memilih untuk berkonflik atau melakukan kerjasama.[[13]](#footnote-13) Tanpa pilihan yang didasari tekanan sosial, yang dalam hal ini adalah yang bersifat transnasional atau lintas batas negara ini, maka negara tidak memiliki alasan rasional dalam menentukan kebijakan luar negerinya.[[14]](#footnote-14) Negara hanya akan bergerak dan merumuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan keinginan untuk memperoleh kekuasaan, dan tujuan dengan tidak memiliki dasar dan fungsi yang jelas. Dengan adanya tekanan sosial tadi maka negara dapat melihat apa yang sebenarnya menjadi kondisi dan kebutuhan dari negaranya pada saat itu dan dengan demikian, kebijakan yang dibuat pun bisa tepat sasaran demi kemajuan negara. Singkatnya, negara berfungsi sebagai perwakilan bagi komunitas domestik dalam menjawab tekanan sosial tadi di sistem internasional.[[15]](#footnote-15)

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, negara memiliki perilaku yang mencerminkan pilihan, melalui kebijakan luar negeri, dari negara tersebut. Kebijakan yang diambil ini juga saling berhubungan dan saling mempengaruhi dengan kebijakan negara lain karena dalam pengambilan kebijakan ini tidak hanya dengan mempertimbangkan kondisi dalam negeri tapi juga bagaimana kondisi luar negeri karena kondisi ini juga berpengaruh dan tujuan dibuatnya kebijakan ini juga dengan alasan agar bisa bertahan dan bersaing di tatanan internasional. Melihat pengaruh ini, maka negara akan berusaha mencari dan memenuhi kebutuhan dan pilihannya ditengah-tengah pengaruh dari kebutuhan dan pilihan negara lain.[[16]](#footnote-16)

Pembuatan kebijakan luar negeri akan selalu terkait dengan kondisi dalam negeri. Henry Kissinger mengatakan bahwa "*foreign policy begins when domestic policy ends*".[[17]](#footnote-17) Istilah ini menunjukkan bahwa disaat kapasitas domestik tidak lagi cukup maka dibutuhkan kebijakan luar negeri sebagai bentuk kegiatan mencari di luar.

Ada 3 pendekatan yang bisa digunakan untuk menganalisa kebijakan luar negeri, yaitu: pendekatan deskriptif, pendekatan evaluatif, dan pendekatan analitikal.[[18]](#footnote-18) Pendekatan deskriptif memaparkan fakta terkait keputusan kebijakan luar negeri, kebijakan yang dipublikasikan, tindakan yang diambil, dan hubungan resmi dan *de facto* antara aktor-aktor internasional. Studi evaluasi menekankan pada konsekuensi tindakan kebijakan luar negeri dan mengamati tujuan yang lebih ditetapkan itu tercapai atau tidak. Sedangkan studi analitikal menekankan pada analisis input kebijakan luar negeri yakni individu, masyarakat, dan pemerintah yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara.

Selain itu ada konsep atau komponen dalam kebijakan luar negeri yang dapat dianalisis secara terpisah, yakni: dimensi orientasi, dimensi komitmen dan rencanatindakan (strategis), serta dimensi tindakan atau perilaku nyata (implementasi).[[19]](#footnote-19) Pertama, orintasi kebijakan luar negeri terdiri dari pelaku, persepi, dan nilai-nilai yang berasal dari pengalaman sejarah dan kondisi strategis yang menandai posisi suatu negara dalam sistem politik dunia. Sebagai dimensi orintasi, kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai kecenderungan dan prinsip umum yang melatarbelakangi tindakan suatu negara dalam hubungan internasional. Berikutnya dimensi komitmen dan strategi. Dimensi ini dikembangkan oleh para pemangku jabatan di pemerintahan suatu negara untuk mendukung atau mengubah situasi internasional sesuai dengan orientasi kebijakan luar negeri yang dimiliki. Dimensi ini juga berkaitan dengan strategi, keputusan, atau kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan. Biasanya, dimensi ini bisa dilihat secara nyata dari publikasi yang bersifat formal seperti konfrensi pers, komunikasi diplomatik atau *statement policy*. Terakhir, dimensi implementasi yang menjelaskan tindakan nyata negara dalam merespon kondisi dan situasi lingkungan eksternal.

Kebijakan luar negeri adalah tindakan yang melibatkan penetapan tujuan objektif, mobilisasi alat atau sumber daya untuk meraih tujuan tersebut dan implementasi atau pengeluaran aktual dari segenap usaha dan sumber daya yang dikeluarkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[[20]](#footnote-20) Pengertian ini menunjukkan dan menjelaskan eleman-elemen dasar yang harus dipertimbangkan saat membuat keputusan yaitu tujuan, pemanfaatan sumber daya, dan implementasi.

Dibelakang penentuan tujuan kebijakan luar negeri selalu dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan nasional. Kepentingan nasional selalu menjadi kekuatan pendorong yang mendasari tindakan yang dilakukan negara.[[21]](#footnote-21) Kepentingan nasional juga dapat digunakan secara objektif sebagai acuan evaluasi dari tujuan atau objektif dan kebijakan suatu negara.[[22]](#footnote-22)

Penanaman modal (investasi) asing merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya di suatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 pengertian investasi asing adalah sebagai berikut :

1. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
3. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Aliran modal dari suatu negara ke negara lainnya bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, yang lebih produktif, dan juga sebagai diversifikasi usaha. Hasil yang diharapkan dari aliran modal asing adalah meningkatnya *output* dan kesejahteraan dunia. Di samping peningkatan *income* dan *output*, keuntungan bagi negara tujuan dari aliran modal asing adalah:

1. Investasi asing membawa teknolog yang lebih mutakhir. Besar kecilnya keuntungan bagi negara tujuan tergantung pada kemungkinan penyebaran teknologi yang bebas bagi perusahaan.
2. Investasi asing meningkatkan kompetisi di negara tujuan. Masuknya perusahaan baru dalam sektor yang tidak diperdagangkan (*non tradable sector*) meningkatkan output industri dan menurunkan harga domestik, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan.
3. Investasi asing dapat berperan dalam mengatasi kesenjangan nilai tukar dengan negara tujuan (*investmen gap*). Masuknya investasi asing dapat mengatasi masalah tidak tercukupinya valuta asing yang digunakan untuk membiayai impor faktor produksi dari luar negeri.

Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan bagi ekonomi maupun politik Indonesia, dimana investasi melalui modal asing secara langsung lebih baik dari pada penarikan dana melalui pinjaman luar negeri, sebab melalui penanaman modal asing secara langsung, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat di kontrol lebih mudah sebab para investor asing berada pada kekentuan hukum di Indonesia, sedangkan melalui pinjaman luar negeri Indonesia akan lebih memperoleh sisi negatif sebab melalui pinjaman luar negeri Indonesia akan di kenai aturan-aturan yang berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Di dalam dunia keuangan, investor adalah orang atau lembaga yang melakukan suatu investasi atau dapat diartikan sebagai orang yang memiliki dana lebih untuk diinvestasikan ke dalam pembelian surat berharga keuangan.

Pasar modal dapat diartikan sebagai pasar yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. Dalam Keppres No. 60 Tahun 1998, pasar modal dipahami sebagai bursa yang menjadi sarana mempertemukan penawaran dan permintaan efek (saham, sertifikat saham dan obligasi). Pasar modal memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai sumber penghimpun dana masyarakat
2. Sebagai peendorong perkembangan investasi
3. Sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan
4. Sebagai sarana alternatif investasi bagi investor

Obligasi merupakan surat utang yang berjangka waktu lebih dari satu bulan dan memiliki tingkat suku bunga yang berubah-ubah. Surat hutang ini dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan menarik dana dari investor dalam negeri dan investor asing yang dapat digunakan untuk pembiayaan perusahaan atau oleh pemerintah untuk keperluan anggaran belanja. Saham adalah bukti kepemilikan bagian modal perseroan yang memberikan berbagai hak menurut ketentuan undang-undang.

Ada beberapa isu yang menjadi kepentingan nasional dan isu ini menjadi tujuan dasar yang harus dicapai semua negara di dunia. Isu tersebut adalah isu yang terkait dengan keselamatan fisik, kesejahteraan materi, lingkungan politik, dan kohesi nasional.[[23]](#footnote-23) Isu keselamatan fisik berkaitan dengan kepentingan negara untuk menjamin keselamatan warga negara dimanapun mereka berada dari segala bentuk ancaman fisik. Isu kesejahteraan materi menjelaskan bahwa negara harus menjamin akses untuk memperoleh kebutuhan primer dan kebutuhan dasar lainnya seperti layanan kesehatan dan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Isu lingkungan politik ingin menjelaskan bahwa negara memiliki kepentingan untuk mempertahankan kebebasannya dalam memilih dan menentukan sendiri struktur sosial-politiknya dan kondisi tata dunia yang menurutnya kondusif. Contohnya adalah negara dapat melakukan intervensi diantara konflik 2 negara, dimana dengan mencoba mendukung salah satu pihak bisa memberikan keuntungan bagi negara tersebut. Sedangkan kohesi nasional ingin menjelaskan kaitan kebijakan luar negeri dengan promosi nilai-nilai, ide-ide, dan ideologi yang menjadi identitas suatu negara.

Ada 3 kepentingan nasional dasar yang dimiliki oleh setiap negara di dunia yaitu: *national survival*, *economic vitality and prosperity*, *core values*.[[24]](#footnote-24)*National survival* berkaitan dengan bagaimana negara menjaga kedaulatannya serta bagaimana negara menggunakan kekuasaannya didalam negara secara penuh dan untuk bertindak secara independen dan mandiri di luar negeri. *Economic vitality and prosperity* adalah kemampuan negara untuk sejahtera dan kuat secara ekonomi dimana kekuatan tadi bisa mempengaruhi posisi negara tersebut didunia internasional. Lalu ada *core values* yang berkaitan dengan identitas negara tersebut. Ketiga kepentingan dasar tadi digunakan sebagai landasan untuk memformulasi kepentingan nasional suatu negara dimana negara harus bisa menentukan kepentingan nasional secara umum ataupun spesifik.[[25]](#footnote-25)

Dalam menentukan kebijakan luar negeri dibutuhkan adanya orientasi atau stretegi umum untuk menggambarkan tindakan dan komitmen negara dalam lingkungan eksternal dan dalam menghadapi ancaman yang ada. Ada empat kondisi atau variabel yang menentukan orientasi[[26]](#footnote-26) yaitu: pertama, pola dominasi, subordinasi, dan kepemimpinan dalam sistem internasional akan mempengaruhi tingkat kebebasan suatu negara dalam bertindak. Kedua, strategi kebijakan luar negeri dari suatu negara dapat dihubungkan dengan perilaku dan kondisi domestik serta kebutuhan ekonomi negara tersebut. Ketiga, persepsi ancaman eksternal yang dapat membahayakan kepentingan nasional dan nilai-nilai internal suatu negara akan mempengaruhi orientasi terhadap lingkungan eksternal. Terakhir, lokasi geografis, topografis, dan kepemilikan sumber daya alam mempengaruhi pemilihan orintasi kebijakan luar negeri suatu negara.

Implementasi adalah hal yang penting untuk merealisasikan tujuan dari kebijakan luar negeri. Implemetasi ini diaplikasikan melalui instrumen dan teknik dimana instrumen dan teknik ini merupakan bentuk *output* kebijakan luar negeri yang paling spesifik. Ada 5 tipe instrumen kebijakan luar negeri.[[27]](#footnote-27) Pertama, instrumen politik dimana negara melatih personil untuk mahir di bidang organisasi politik dan kepemimpinan untuk ditempatkan negara target guna memanipulasi proses politik di negara target. Akan tetapi, instrumen ini hanya akan berfungsi jika negara target mau diajak untuk bekerja sama dan walaupun sifatnya resmi, instrumen ini biasanya bersifat tertutup. Instrumen kedua adalah diplomasi dimana seorang diplomat mewakili dan memperjuangkan kepentingan negaranya. Instrumen ini melakukan tugasnya dengan teknik persuasi untuk menyakinkan suatu pihak untuk terkait suatu sudut pandang dan teknik negosiasi untuk mencapai persetujuan yang menguntungkan semua pihak. Instrumen ketiga adalah informasional untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan kebijakan luar negeri suatu negara, bisa dilakukan dengan menggunakan media komunikasi massa atau dengan cara pemberian bantuan atau hibah. Yang terakhir adalah instrumen militer. Instrumen ini bersifat memaksa dan digunakan jika instrumen yang lain tidak memberikan hasil.

1. **Hipotesis**

Dengan adanya regulasi PMA yang lebih fleksibel dalam bidang perbankan dan juga disetujuinya Pakto 88, maka PMA (perbankan) ke Indonesia akan semakin meningkat.

1. **Operasional Variable dan Indikator**

Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam persiapan penelitian ialah mendayagunakan sumber infomasi yang terdapat di perpustakaan, baik secara konvensional maupun digital. Oleh karena itu, pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur.

Data-data yang digunakan merupakan data sekunder yang relevan dengan penelitian, berasal dari bahan publikasi dan dokumentasi. Bentuk ata tersebut didapat dari buku-buku, jurnal, surta kabar, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti pemanfaatan media maya (internet).

Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam persiapan penelitian ialah mendayagunakan sumber infomasi yang terdapat di perpustakaan, baik secara konvensional maupun digital. Oleh karena itu, pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur.

Untuk dapat mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Penulis mempelajari buku-buku yang bersumber pada buku-buku bacaan tentang ilmu Hubungan Internasional, yang berkaitan dengan Perbankan dan Penanaman Modal Asil. Selain itu, penulis juga bersumber pada berita yang dimuat oleh berbagai media, baik online maupun cetak.

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Secara sederhana, oleh Miles and Huberman (1974) dinyatakan bahwa “terdapat dua model pokok dalam melaksanakan analisis di dalam penelitian kualitatif, yaitu model analisis jalinan atau mengalir (*flow model of analysis*) dan model analisis interaktif. Analisis dalam penelitian kualititaf terdiri dari tiga komponen pokok meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.” (Sutopo, 2002: 94).

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif: (1) teks naratif; atau (2) matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptik, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Awalnya belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan kokoh.

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
   1. **Tingkat Analisis**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dinilai tepat, karena dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis. Data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya[[28]](#footnote-28).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasikan suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel-variabel anteseden yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

* 1. Metode Penelitian

Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi[[29]](#footnote-29). Data disampaikan dalam bentuk penekanan pada persoalan kontekstual dan tidak terikat dengan perhitungan angka-angka atau ukuran yang bersifat empiris.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada.
2. Mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.
3. Membuat perbandingan atau evaluasi.
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Metode deskriptif menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (*naturalist setting*). Peneliti tidak bertindak sebagai pengamat, ia hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasinya. Dengan suasana alamiah dimaksudkan bahwa peneliti terjun ke lapangan. Ia tidak berusaha untuk memanipulasi variabel, karena kehadirannya mungkin mempengaruhi perilaku geja (*reactive measures*), peneliti berusaha memperkecil pengaruh ini[[30]](#footnote-30).

Prosedur metode penelitian analisis deskriptif meliputi:

1. Rancangan dan metode penelitian
2. Jenis dan sumber data yang digunakan
3. Teknik pengumpulan data yang digunakan
4. Teknik analisis data yang digunakan
5. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
6. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat-tempat dimana kita mendapatkan data melalui studi kepustakaan. Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat pencarian data dalam penelitian adalah:

* 1. Perpustakaan Ali Alatas (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia)

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat

* 1. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung

Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung

* 1. Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia

Jalan Jenderal Sudirman 32, Intiland Tower, Lantai 16, Jakarta.

* 1. *Center for Strategic and International Studies* (CSIS)

Jalan Tanah Abang III No. 23-27, Jakarta Pusat

* 1. Research Center – Universitas Indonesia

Kampus Baru UI Depok, Indonesia

1. Lama Penelitian

Penelitian diperkirakan akan dilakukan kurang lebih satu semester atau enam bulan, terhitung dari bulan November 2009 sampai bulan Mei 2016, yang dimulai dari persiapan judul proposal penelitian, pencarian data dan pengolahan data.

1. **Sistematika Pembahasan**

Penulisan Skripsi ini disusun secara teratur dan terperinci tiap babnya, dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas pada pembahasan penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** : PENDAHULUAN, menguraikan secara singkat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II** : TINJAUAN PUSTAKA, berisi pembahasan teoritis secara garis besar berisi tentang keadaan perbankan di Indonesia secara umum.

**BAB III** : OBJEK PENELITIAN, berisi penegasan identifikasi isu atau fenomena yang diteliti dan penggambaran isu atau fenomena tersebut, yakni investasi yang dilakukan bank asing di Indonesia.

**BAB IV** : Menguraikan analisis data, pembahasan penelitian, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu analisis mengenai regulasi yang nantinya dibandingkan dengan dua negara di Asia Tenggara yaitu Singapura dan Vietnam.

**BAB V** : Kesimpulan yang diambil berdasarkan analisa hal-hal penting, keunikan, kelebihan atau kekurangan, serta saran-saran yang membangun.

**KP**

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi[[31]](#footnote-31), yaitu:

* 1. Investasi Portofolio

Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emitmen), belum tentu membuka lapangan kerja baru. Sekalipun ada emitmen yang setelah mendapat dana dari pasar modal untuk memperluas usahanya atau membuka usaha baru, hal ini berarti pula membuka lapangan kerja. Tidak sedikit pula dana yang masuk ke emitmen hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin malah untuk membayar hutang bank. Selain itu, dalam proses ini tidak terjadi alih teknologi atau alih keterampilan manajemen.

* 1. Investasi Langsung

Investasi langsung atau disebut juga dengan penanaman modal asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investmen* (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen/ jangka panjan, PMA memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini penting diperhatikan, mengingat bahwa masalah menyediakan lapangan kerja merupakan masalah yang cukup memusingkan pemerintah.

1. Definisi, fungsi, dan peran bank umum dalam perekonomian (Tersedia-Online) <http://putracenter.net/2009/09/23/definisi-fungsi-dan-peranan-bank-umum-dalam-perekonomian/> diakses pada 9 Maret 2014 [↑](#footnote-ref-1)
2. Jay R. Ritter, *Investment Banking and Securities Issuance*, Gainesville: University of Florida [↑](#footnote-ref-2)
3. Kamus Bisnis dan Bank <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bank_investasi.aspx> [↑](#footnote-ref-3)
4. Andryanto, *Penanaman Modal Asing Dalam Rangka Investasi di Indonesia,* 2013 (Makalah Fakultas Hukum Universitas Jember) [↑](#footnote-ref-4)
5. Levine dalam Widjojo Nitisastra, 2010, *Pengalaman Pembangunan Indonesia.* Kompas. Jakarta [↑](#footnote-ref-5)
6. Santoso, 1996 hlm. 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kasmir, 2002 hlm. 1-2 [↑](#footnote-ref-7)
8. Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, 2000, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-8)
9. Horst Kohler,*Toward a Better Globalization*, (2002), hal1. [↑](#footnote-ref-9)
10. BERR : Department for Business Enterprise & Regulatory Reform.2008.*Globalisation and The Changing UK Economy*. [↑](#footnote-ref-10)
11. Andrew Moravcsik, *Liberal Theories Of International Relations : A Primer*, (2010), hal 1. [↑](#footnote-ref-11)
12. Andrew Moravcsik,ibid. [↑](#footnote-ref-12)
13. Andrew Moravcsik, *Preferences Seriously : A Liberal Theory of International Politics*, hal 516. [↑](#footnote-ref-13)
14. Andrew Moravcsik, op.cit. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid,hal 3 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid. [↑](#footnote-ref-16)
17. Wolfram F. Hanrieder, *Comparative Foreign Policy: Theritical Essays*, (New York: David McKay Co, 1971), hal. 22. [↑](#footnote-ref-17)
18. Deborah J. Gerner, *The Evolution of the Study of foreign Policy*. Dalam Laura Neck, Jeanne A.K. Hey, Patrick J. Haney (ed.), *Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in its Second Generation*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1995), hal. 18. [↑](#footnote-ref-18)
19. James N. Rosenau, *The Study of foreign Policy* Dalam James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson (ed.), *World Politics: An Introduction* (New York: The Free Press, 1976), hal 15. [↑](#footnote-ref-19)
20. Howard H. Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*, (Ohio: Charless E. Merrill Publishing Company, 1974), hal. 3. [↑](#footnote-ref-20)
21. John T. Rourke, *International Politics in World Stage,* (Connecticut: Dushkin Publishing Group, 1993), hal. 197. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid. [↑](#footnote-ref-22)
23. Op.cit. hal 215-216. [↑](#footnote-ref-23)
24. Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity*, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1997), hal. 86-87. [↑](#footnote-ref-24)
25. John T. Rourke. Loc. Cit. hal. 87. [↑](#footnote-ref-25)
26. K.J. Holsti, 1981, *International Politics: A Framework for Analysis*, 3rd Ed., (New Delhi: Prentice-Hall of India, 1997). hal. 168. [↑](#footnote-ref-26)
27. Howard H. Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*, (Ohio: Charless E. Merrill Publishing Company, 1974), hal. 216-220. [↑](#footnote-ref-27)
28. A. Matthew, Miles, A. Michael, Huberman, *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru,* (Jakarta: UI-Press, *1992*) [↑](#footnote-ref-28)
29. Jalaluddin, Rakhmat. *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. Ke 11. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid* hal 25 [↑](#footnote-ref-30)
31. Pandji Anoraga, 1995. *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing.* Jakarta, hlm. 46 [↑](#footnote-ref-31)